

Optimalisasi Pendidikan Multikultural di Madrasah

Harun Arrosyid
MIS Hasanuddin II

Corresponding Author: Harun Arrosyid harunarrosyid020279@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Optimalisasi,
Pendidikan Multikultural

Received : 08, Oktober

Revised : 13, Oktober

Accepted: 25, Oktober

©2022Arrosyid: This is an
open-access article distributed
under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Intensi formulasi artikel ialah menganalisis dan menemukan efektifitas implementasi pendidikan multikultural di madrasah. *Qualitative approach* dengan jenis penelitian *case study* merupakan preferensi penelitian. *In depth interview* (wawancara mendalam), *deep observation* (observasi mendalam) serta studi dokumentasi merupakan hierarki teknik pengumpulan data. *Individual case* diaplikasikan sebagai bahan analisis data. Formulasi pengecekan data mengaplikasikan kredibilitas dan konfirmabilitas. Hasil riset mendeterminasikan bahwa pendidikan multikultural memiliki peran sentral dalam memanifestasikan karakter menerima perbedaan (*difference*) dalam keberagaman di madrasah. *Multicultural education* memberikan akses konstruktif dalam membentuk perilaku saling menghargai, saling menghormati perbedaan serta kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Kebhinekaan merupakan partikularitas bangsa Indonesia. Fakta tersebut dibuktikan dengan teridentifikasinya 200 lebih model bahasa daerah, 300 suku bangsa serta ribuan corak kebudayaan dan adat istiadat.¹ Toleransi dan transparansi tentunya sangat dibutuhkan dalam memmanifestasikan kerukunan dan kedamaian dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Konteks kemajemukan (*heterogenitas*) tersebut merupakan resistensi tersendiri sebagai divergensi dengan bangsa lain. Pluralitas tersebut diformulasikan oleh pioner bangsa yang termaktub dalam konklusi Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis formal. Corak keragaman tersebut direpresentasikan dalam slogan “ *Bhinneka Tunggal Ika* ” dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Semboyan tersebut merupakan bukti konkrit Negara Indonesia secara *sosial-kultural* merupakan komunitas plural yang ideal. Istilah multikultural telah terpatri sebagai partikularitas bangsa Indonesia. Secara elementer multikultural didefinisikan sebagai kemajemukan atau keanekaragaman. Multikultural tumbuh berkembang menjadi suatu persepsi multikulturalisme yang diimplementasikan secara masif oleh publik. Konsep tersebut dipahami sebagai prosedur mengelola kemajemukan bangsa dengan intensi sinkronisasi kultur dan mencegah konflik antar budaya.²

Kemajemukan dan kebhinekaan tersebut pada akhir-akhir ini diuji. Fenomena intoleransi dan disintegrasi bangsa menyeruak melalui media cetak dan elektronik. Konflik dan kerusakan di beberapa daerah menghiasi pemberitaan diberbagai media. Isu maupun rumor SARA, HAM, terorisme, radikalisme dan aksi kekerasan menjadi informasi sentral dari beberapa topik utama berita. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya problem akut yang memerlukan respons eksklusif . Tindakan preventif dan prosedur terstruktur serta dukungan semua pihak (*stake holder*) terkait sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kasus tersebut. Sinkronisasi antar kultur pada masa globalisasi merupakan bentuk intimidasi serta ancaman nyata bagi peserta didik sebagai generasi bangsa. Tindakan konkrit terhadap fenomena tersebut ialah diperlukan suatu formulasi rekognisi beragam. Kompetensi universal diperlukan sehingga setiap individu kapabel bersaing dalam rivalitas global. Mindset cinta dan bangga kebudayaan sendiri hendaknya diinternalisasikan sejak dini sehingga prestise dan jati diri bangsa terpelihara dengan baik.

Multicultural education merupakan opsi substansial sebagai keniscayaan ditengah komunitas plural. Konteks tersebut pada hakikatnya disandarkan pada persepsi bahwa setiap individu memiliki personalitas, histori, rekognisi kehidupan serta kecenderungan intelektual divergen.³ UNESCO sebagai badan khusus PBB yang fokus pada pendidikan, keilmuan dan kebudayaan dunia merilis empat pilar pendidikan. Pertama, belajar untuk mencari tahu (*Learning to Know*) Kedua, belajar untuk berkreasi dan melakukan (*Learning to Do*) Ketiga, belajar untuk menjadi pribadi (*Learning to Be*) Keempat, belajar untuk hidup berdampingan dalam kedamaian (*Learning to Live Together and Peace*).

Sementara itu orientasi pendidikan nasional di Indonesia tidak hanya cukup dengan implementasi empat pilar tersebut. Terdapat penambahan satu pilar sebagai representasi budaya dan nilai luhur bangsa yang berfalsafah Pancasila. Pilar tersebut adalah belajar untuk memperkuat keimanan, ketaqwaan dan *behavioral attitude* (akhlak mulia).⁴ Pilar keempat (*learning to live together and peace*) dan pilar kelima merupakan aspek krusial dalam pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Memformat mindset harmonisasi dengan hidup berdampingan secara damai dan resistensi akhlak mulia merupakan asas sentral bangsa. Adapun beberapa perspektif yang perlu dihindari sebagai ikhtiar merawat kebhinekaan dalam konteks ke-Indonesiaan dideterminasikan sebagai berikut. *Pertama*, persepsi rasial yang eksekif (berlebihan) atau primordialisme. *Kedua*, perspektif cenderung menyepelkan kultur suatu komunitas sehingga mengunggulkan buda sendiri (*etnosentrisme*). *Ketiga*, perilaku membedakan personal berdasar faksi, genus, ras, status ekonomi, suku bangsa, agama serta elemen budaya yang lain (*diskriminatif*). *Keempat*, persepsi perihal sifat general suatu komunitas berasas praduga (*stereotip*).

METODE PENELITIAN

Qualitative approach dengan jenis penelitian *case study* merupakan preferensi penelitian. *In depth interview* (wawancara mendalam), *ideepiobservati on* (observasi mendalam) serta studi dokumentasi merupakan hierarki teknik pengumpulan data. *Individual case* diaplikasikan sebagai bahan analisis data. Formulasi pengecekan data mengaplikasikan kredibilitas dan konfirmabilitas.

PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Multikultural

Edukasi merupakan instrumen sentral internalisasi domain multibudaya dan kebhinekaan kepada peserta didik. Persepsi tersebut terkonstruksi karena pendidikan memiliki kapasitas sentral dalam pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan juga mempunyai kapabilitas sebagai mediator (*guiding light*) bagi setiap personal anak bangsa. Pendidikan multikultural pada konteks ini diharapkan berfungsi sebagai instrumen pembangunan umat sehingga perlu dikembangkannya dogma pluralis dengan konsep komprehensif. Konsepsi tersebut diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada aspek prosedur berpikir bahwa agama hanya sebagai rambu pengingat. Internalisasi kesadaran bahwa kemajemukan dan keberagaman dalam kehidupan adalah anugerah juga perlu direalisasikan. Mindset kesadaran bahwa moralitas dan platform dapat dilahirkan melalui formasi kultur atau bahkan ideologi agama lain.⁵

Esensi pendidikan secara substansial adalah usaha normatif untuk mengembangkan fitrah manusia melalui konsep dasar pendidikan. Nilai instrinsik merupakan landasan pendidikan dalam memelihara aspek-aspek yang berafiliasi dengan alterasi tingkah laku dan perbaikan moral anak didik.

Pendidikan pada gilirannya menjadi komponen sentral dalam kehidupan. Pendidikan merupakan merupakan landasan alternatif untuk menemukan makna substansial pendidikan. Esensi pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah tatanan dasar dalam dunia pendidikan yang mencakup nilai dan intisari pendidikan sebagai edukasi berbasis moral.⁶ Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan petisi ataupun syarat dalam tumbuh kembangnya anak-anak.⁷ bahwa Proses pengaktualisasian diri (*self actualization*) dalam menemukan substansi pendidikan yang sebenarnya. Tercapainya aktualisasi diri sebagai pribadi Muslim yang utuh ditandai dengan semakin tampaknya pencarian jati diri (*identity personal*) dalam konteks ikhtiar pendekatan kepada Tuhan.⁸

Pendidikan dipahami sebagai proses pendewasaan sosial menuju tatanan ideal. Ihwal tersebut berorientasi merawat dan memberdayakan fitrah manusia, baik itu menyangkut potensi maupun kapasitas serta kemampuan insani menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.⁹ Pendapat Mortimer J. Adler dalam bukunya *Philosophy of Education*, pendidikan adalah proses dengan segenap potensi manusia (bakat dan minat) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan dan disempurnakan dengan kebiasaan kebiasaan produktif. P revalensi tersebut melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapa pun demi membantu orang lain dan dirinya sendiri mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya.¹⁰ John Dewey pernah mengatakan bahwa *education is the process without end*.¹¹ (Pendidikan adalah proses tanpa akhir) atau istilah yang lebih populer dikenal dengan long life education. Begitulah sebenarnya fungsi pendidikan yang berlangsung secara berkesinambungan tanpa terputus-putus oleh waktu dan tempat. Pendidikan merupakan hierarki dalam usaha memberikan manusia segala bentuk kondisi dan keadaan yang berorientasi pada pemberdayaan potensi diri. Pendidikan seumur hidup didefinisikan bahwa pendidikan merupakan elemen kehidupan. Pendidikan merupakan kehidupan, sehingga pengalaman belajar dapat diselenggarakan pada segala macam lingkungan dan dilaksanakan sepanjang hayat.¹²

Pendidikan dalam perspektif Islam berpedoman pada dua macam basis utama yakni Al Qur'an dan Hadits. Kedua sumber hukum Islam tersebut didalamnya menjelaskan tentang kata *tarbiyah*, *ta'lim* maupun *ta'dib*. Kata-kata tersebut memiliki makna yang berafiliasi dengan pendidikan.¹³ Prof. Dr. Omar Muhammad al Touny al-Syaebani menyatakan bahwa pendidikan Islam ialah

segala ikhtiar merubah watak, karakter masing-masing individu dalam kehidupan diriya atau kehidupan di masyarakat.

Istilah *multicultural* memiliki analogi dengan kata *plurality and diversity* yang bermakna keragaman. Pendidikan multikultural di Indonesia disandarkan pada khazanah tradisi dan budaya luhur bangsa. Multikultural lebih populer dengan ideologi keberagaman terhadap tradisi yang dilestarikan populasi tertentu. Esensi multikulturalisme ialah legalisasi terhadap prestise personal yang bersosialisasi dengan masyarakatnya dengan spesifikasi tradisi dan budayanya. Setiap pribadi diposisikan secara adil dan terhormat serta bertanggung jawab untuk bersosialisasi dan hidup dalam masyarakatnya. Sementara itu Zakiyuddin Baidhawiy merepresentasikan multikultural sebagai fakta keberagaman budaya yang tumbuh dan dilestarikan suatu komunitas, struktur pemerintahan, struktur ekonomi, tatanan keagamaan, kaum terpelajar maupun pranata tertentu.

Kata multikultural dalam konteks Negara Indonesia memiliki harmonisasi dengan istilah kebhinekaan yang bermakna perbedaan. Istilah *Bhineka* berakar dari bahasa sansekerta yang termaktub dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Formulasi Bhineka Tunggal Ika dideskripsikan dengan keberagaman dengan perspektif global. Mpu Tantular menginterpretasikan bahwa keberagaman, kebhinekaan maupun pluralitas hanya terfokus pada fakta materi-biotik. Interpretasi dimensi keesaan (*unity*) yang artistik maka aspek materi-biotik hendaknya dideterminasikan dengan intensi ditemukannya realitas bermakna yang harmoni dan artistik.¹⁴ Menurut Ambarudin, pendidikan multikultural merupakan sistem edukasi yang terformat pada aktivitas pembelajaran yang memberikan prestise disimilaritas (perbedaan) merupakan ihwal lumrah.¹⁵ Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hujurat ayat 13 :



Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat : 13)

Berdasar deskripsi tersebut dimensi pendidikan multikultural dalam konteks ini didefinisikan oleh beberapa pakar sebagai berikut :

- a. Menurut Banks, konsep pendidikan multikultural bermakna edukasi yang mendistribusikan peluang yang sama kepada peserta didik (*equal right*) tanpa memandang genus, status sosial, etnik, kelompok atau spesifikasi tradisi lain dalam aktivitas belajar di sekolah.¹⁶
- b. Ainurrofiq Dawam menginterpretasikan pendidikan multikultural sebagai prosedur ekspansi segenap kemampuan personal bernilai pluralitas dan kebinekaan sebagai akses heterogenitas adat istiadat, kesukuan, fikrah maupun dogma.¹⁷
- c. Muhaemin el Ma'hady mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan edukasi dengan perspektif keragaman tradisi sebagai reaksi transformasi demografis dan nilai domain publik tertentu bahkan mayapada secara komprehensif.¹⁸
- d. H.A.R Tilaar menyatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan teks lintas batas yang mendeskripsikan persoalan perspektif keadilan sosial, permufakatan dan hak prinsipil personal, fenomena politik, integritas, edukasi dan agama.¹⁹
- e. Pendidikan multikultural menurut Zubaedi adalah sebuah aktivitas reaktualisasi yang mengonversikan segenap dimensi edukasi termasuk merenovasi kualitas prinsip pendidikan, kaidah prosedur, kurikulum, entitas pengajaran, komposisi organisasi dan strategi pemerintah yang merepresentasikan kebinekaan budaya sebagai fakta masyarakat Indonesia.

Pandangan lain juga disampaikan oleh Gorsky dan Covert yang mendefinisikan pendidikan multikultural dengan identitas berikut :

- a. Peserta didik memiliki peluang dan hak yang sama (*equal right*) untuk mengembangkan kapasitas pribadinya.
- b. Mengkonstruksi peserta didik untuk berkontribusi secara profesional dalam komunitas interkultur.
- c. Mengembangkan mindset untuk tidak memandang motif kultur yang divergen
- d. Lembaga pendidikan seyogyanya berperan aktif dalam memberikan pengalaman siswa serta memutus mata rantai despotisme (penindasan).
- e. Proses pendidikan berpusat pada peserta didik dan reseptif terhadap proposisi.²⁰

Prinsip Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural dimanifestasikan sebagai aktivitas restorasi (pembaharuan) dan prosedur untuk memanifestasikan domain edukasi yang proporsional bagi keseluruhan peserta didik. Prinsip-prinsip pendidikan

multikultural meliputi (1) aktivitas politik dengan intensi mengkonfirmasi keadilan sosial bagi segenap kelompok masyarakat tanpa melihat motif dan latar belakangnya. (2) pembelajaran dan kelembagaan merupakan dua komponen sentral yang saling berafiliasi dan tidak terpisahkan, sehingga perlu ditanggulangi melalui restorasi yang ekstensif. (3) fokus terhadap pembaharuan pendidikan secara menyeluruh yang diperoleh dari kajian perseptif atas teknik prosedur otoritas dan prerogatif dengan orientasi reaktualisasi pendidikan. (4) menyuplai garansi atau jaminan peserta didik agar memperoleh peluang untuk mendapatkan performa terbaik berdasar kapasitas yang dimiliki. (5) model pendidikan yang efektif dan efisien memformat peserta didik tanpa melihat latar belakangnya.²¹ Yusuf al-Qardhawi mendeskripsikan bahwa orientasi pendidikan multikultural ialah mengangkat kualifikasi atau kompetensi personal sehingga kapabel memanifestasikan nilai-nilai kemanusiaan yang berkarakter universal. Dimensi tersebut mencakup nilai kesetaraan (ekuivalensi), toleransi, pluralisme serta demokrasi.

Menurut Gorsky, tujuan dan prinsip pendidikan multikultural mencakup beberapa dimensi. (1) setiap peserta didik memiliki peluang (probabilitas) yang sama pada aspek kompetensi dan performanya. (2) asumsi belajar dan berfikir kritis (*critical thinking*) bagi peserta didik. (3) peserta didik berperan aktif dalam aktivitas pembelajaran dengan memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang lebih komprehensif. (4) memfasilitasi ragam belajar peserta didik. (5) komplimen serta apresiasi terhadap partisipasi dari setiap komunitas yang divergen. (6) mengelaborasi mindset positif terhadap komunitas yang memiliki lingkungan yang berbeda. (7) pengembangan persepsi warga Negara yang taat dan patuh terhadap sistem yang berlaku di sekolah ataupun di masyarakat. (8) pembiasaan diri mengevaluasi rekognisi dari sudut pandang lain. (9) intensi pengembangan identitas etnik, nasional maupun global. (10) pengembangan kompetensi dan kapabilitas individu dalam penentuan sikap dan kajian kritis. Selanjutnya prinsip pendidikan multikultural menurut Gorsky dijabarkan sebagai berikut. (a) transparansi dalam penentuan materi pelajaran berdasar konteks kultur peserta didik. Transparansi tersebut mengintegrasikan persepsi yang berbeda dan berlawanan. (b) komposisi materi pelajaran yang ditetapkan berisi disparitas dan persamaan dalam lintas komunitas. (c) penetapan substansi pelajaran berdasar pada waktu dan tempat.

Prinsip pendidikan multikultural pada tahap implementasi menurut Ismail Fuad mencakup beberapa komponen. *Pertama*, kapabel mempromosikan model kurikulum yang mendeskripsikan opini dan ideologi publik. *Kedua*, berpedoman pada proposisi bahwa tidak ada interpretasi tersendiri terhadap aktualitas sejarah. *Ketiga*, kurikulum diperoleh berdasar pada aksentuasi kajian komparatif dengan perspektif kultur yang berbeda. *Keempat*, kompeten memberikan kontribusi terhadap kaidah sentral yakni memusnahkan ideologi klise ihwal suku, adat istiadat dan agama.

Sementara itu Tilaar mendeskripsikan tiga kaidah sentral pendidikan multikultural. *Pertama*, berbasas aspek pedagogik ekualitas manusia. *Kedua*,

intensi sentral ialah memmanifestasikan insan Indonesia kompeten serta membentuk personal yang kapabel memahami sains, ilmu pengetahuan dan technology. *Ketiga*, Menghindari phobia terhadap globalisasi dengan internalisasi sikap percaya diri sebagai bangsa yang berorientasi pada nilai dan kaidah yang baik atau buruk.²² Selanjutnya Tilaar mengemukakan bahwa konstruksi pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan beberapa aspek pendukung. (1) personalitas tradisi lokal dan hak atas budaya (*right to culture*). Pendidikan multikultural diorientasikan kapabel memmanifestasikan *civil society* (komunitas madani) ditengah arus budaya universal. (2) aspek kultur *Indonesia-yang-menjadi* merupakan pedoman bagi setiap personal dan tiap ciri budaya mikro Indonesia. Pendidikan multikultural sebagai formasi aktual prosedur pendidikan di Indonesia memerlukan formulasi tentang orientasi pendidikan yang dikonstruksi kepada proteksi dan pengembangan persepsi *nation state* yakni khazanah kultur yang berasal dari suku bangsa yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) persepsi pendidikan multikultural normatif dengan orientasi memmanifestasikan kebhinekaan yang dimiliki suatu negara. Akan tetapi konsepsi tersebut bukanlah klaim dengan mengabaikan corak adat istiadat setempat. Paradigma tersebut memberikan resistensi personalitas suku sehingga kapabel memmanifestasikan kebudayaan Indonesia sebagai milik segenap warga Negara Indonesia. (4) pendidikan multikultural sebagai paradigma rekonstruksi sosial. Konsep tersebut bermakna sebagai ikhtiar memprediksi ulang aktivitas sosial aktual. Sehingga pendidikan multikultural tidak mengenal ortodoksi sosial-budaya termasuk dogma, karena setiap populasi memahami dan menghargai setiap disparitas. Sehingga istilah *xenophobia* tidak dikenal dalam konsep pendidikan multikultural. *Xenophobia* merupakan ketakutan ekstrem atau ketidaksukaan terhadap orang asing, adat istiadat, agama dan lain-lain. (4) diperlukan konteks pedagogik aktual dalam konsep pendidikan multikultural Indonesia. Stigma tersebut diperlukan karena kultur budaya Indonesia membutuhkan konsep pendidikan dengan hati (*education with heart*) dengan intensi prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang pluralistik. Aspek pedagogik yang diperlukan ialah pedagogik pemberayaan dan pedagogik ekuivalensi manusia dalam keberagaman kultur.²³ (5) berorientasi memmanifestasikan visi masa depan dan etika berbangsa yang termaktub dalam TAP/MPR RI tahun 2001 nomor VI dan VII.²⁴

Spesifikasi Pendidikan Multikultural

Buku *Islamic Multicultural Education* yang ditulis Mundzier Suparta menegaskan beberapa definisi pendidikan multikultural. *Pertama*, merupakan filosofi yang menitikberatkan substansi sentral terhadap legalitas kebhinekaan suku bangsa dan budaya dalam memformat aktivitas pribadi, komunitas ataupun bangsa. *Kedua*, meligitimasi suatu ideologi pluralisme budaya melalui organisasi pendidikan yang disandarkan pada dogma *equality*, saling menerima, memahami, menghormati serta komitmen integritas dalam

memanifestasikan keadilan sosial. *Ketiga*, pendekatan pembelajaran yang disandarkan prinsip demokrasi yang memotivasi berkembangnya kebhinekaan budaya yang komprehensif. Equality pendidikan serta menghilangkan segala bentuk eksploitasi dengan *improvement* kurikulum. *Keempat*, reformasi pendidikan secara ekstensif yang dimulai dari tingkat dasar. Objeknya ialah segenap peserta didik agar mampu berafiliasi antar individu dikelas dengan menginternalisasikan asas demokrasi keadilan sosial. Orientasinya ialah agar setiap personal kapabel melawan motif segregasi yang menindas. Pendidikan multikultural perseptif memiliki beberapa spesifikasi. *Pertama*, menghargai kultur peserta didik. *Kedua*, menolak adanya dominasi (hegemoni).

Ketiga, adanya proses refleksi terhadap aktivitas pengajaran (pedagogi). *Keempat*, mengkonstruksi dan membangun rasa kapasitas pribadi. Kelima, memotivasi independensi dalam menganalisis fenomena polemis. Keenam, prospektif terhadap alterasi masa depan, keadilan dan paralelisme dari segenap anggota sosial budaya.²⁵ Pendidikan multikultural pada hakikatnya memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) berorientasi memanifestasikan personal dan komunitas berbudaya. 2) entitas mengajarkan harkat kemanusiaan, kualitas kehidupan bernegara dan nilai komunitas adat istiadat. 3) memformat suatu desain pembelajaran demokratis yang menghormati substansi disparitas dan kebhinekaan kultur bangsa dan komunitas etnik. 4) evaluasi didasarkan pada karakteristik peserta didik yang mencakup rekognisi, persepsi dan respons terhadap adat istiadat yang lain.

Sementara itu Laurence A. Blum mengemukakan bahwa multikulturalisme memiliki tiga karakteristik sentral. *Pertama*, mengisbatkan jati diri budaya personal dengan cara mengkaji dan mengevaluasi aset budaya personal tersebut. *Kedua*, menghargai dan berkehendak mengasosiasikan dan melakukan studi terhadap kebudayaan lainnya. *Ketiga*, mengevaluasi dan harmonisasi terhadap perbedaan (*divergensi*) sebagai realitas hidup yang dinyatakan efektif, harus dipertahankan dan dilestarikan.

Konteks pendidikan multikultural menurut James Banks mempunyai beberapa komponen yang saling berafiliasi. *Pertama*, mengintegrasikan berbagai kultur dan komunitas untuk merepresentasikan konsepsi dasar, generalisasi dan filosofi dalam bidang kajian (*content integration*). *Kedua*, mengantarkan peserta didik menginterpretasikan ekse budaya dalam setiap disiplin ilmu (*the knowledge construction process*). *Ketiga*, harmonisasi teknik pembelajaran dengan kaidah belajar peserta didik sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap performa akademik peserta didik beragam dari aspek suku bangsa, genus, kultur maupun status sosial (*an equity paedagogy*). *Keempat*, identifikasi partikularitas peserta didik serta memilih kaidah pembelajarannya. Intensi hal tersebut ialah agar komunitas berkontribusi terhadap aktivitas pembelajaran serta mampu bersosialisasi dengan segenap warga sekolah dengan spesifikasi yang berbeda (*prejudice reduction*).²⁶

Pendidikan Multikultural Predisposisi Nusantara

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 55 ayat 1 mendeskripsikan tentang parameter pendidikan karakter. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa “ masyarakat pada pendidikan formal dan informal sesuai dengan spesifikasi agama, domain sosial dan budaya untuk interes publik”.²⁷ Berdasar deskripsi tersebut motivasi yang ingin dibangun adalah mindset memprioritaskan relevansi pendidikan level nasional yang pluralistik.²⁸ Bab I pasal 1 ayat 16 menjelaskan, “ pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan yang berasas kekhasan agama, sosial budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai manifestasi pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.”²⁹

Selanjutnya pada bab III pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa “ pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai religious, nilai kebudayaan, dan kemajemukan bangsa.”³⁰ Dijelaskan pula pada bab IV pasal 11 ayat 1, “ pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”³¹ Makna kalimat tanpa diskriminasi mengindikasikan melegalkan dan memufakati istilah pluralitas. Akan tetapi diskriminatif tidaklah bermakna serba sama.

Konteks pendidikan multikultural juga direpresentasikan pada bab VIII pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan, “ kurikulum disusun berdasar jenjang pendidikan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan (1) peningkatan iman dan taqwa (2) peningkatan akhlak mulia (3) peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik (4) keragaman potensi daerah dan lingkungan (5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional (6) tuntutan dunia kerja (7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (8) dinamika perkembangan global (9) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan”.

Terdapat tiga aspek sentral yang dapat dilakukan sebagai ikhtiar membatasi beragam intimidasi heterogenitas bangsa menurut Gus Dur. *Pertama*, konkretisasi kaidah hukum secara eksplisit terhadap aktor kekerasan serta pemaksaan kehendak dengan simbol agama. *Kedua*, memberikan motivasi terhadap organisasi dan komunitas keagamaan agar mendahulukan dialog dan kolaborasi pada aspek sosial dan kebudayaan. *Orientasi stigma* tersebut adalah terkonstruksinya sikap toleransi sehingga dapat dikembangkan secara komprehensif. *Ketiga*, kaidah kaidah toleransi hendaknya diinternalisasi kan sejak awal dan diimplementasikan secara kontinuitas mulai jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.³² Potret budaya Indonesia yang plural memberikan petisi terkonstruksinya prinsip permisif dalam tiap komunitas publik. Prinsip toleran tersebut hendaknya dimanifestasikan oleh segenap komponen dan konstituen masyarakat. *Orientasi implementasi sikap*

tersebut ialah terkonstruksinya komunitas yang solid dengan karakteristik plural yang kaya inspirasi aktual.

Indonesia sebagai Negara yang menyanggah predikat *plural society* mempunyai aktiva kebhinekaan kultur yang beragam. Keanekaragaman tersebut seyogyanya dipelihara dan dilestarikan untuk menunjang kemajuan bangsa.

Pendidikan multikultural diharapkan kapabel dalam menjawab transfigurasi zaman ditengah masyarakat plural. Diperlukan transformasi elementer dalam memanifestasikan kesadaran maupun mindset multikulturalisme sebagai simbol nasional. Partikularitas tersebut berasas pada apresiasi terhadap kebhinekaan dan keberagaman masyarakatnya.³³

K.H Hasyim Muzadi secara spesifik mengungkapkan gagasan pokok pendidikan multikultural dengan konsep Islam *rahmatan lil 'alamin* perspektif global. *Pertama*, mengaplikasikan konsepsi moderat (*tawassuth*) dan tegak (*'itidal*). Konsep tersebut dimanifestasikan dengan toleransi (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), dialog (*tasyawur*). *Kedua*, tabayyun serta penyeimbang terhadap maraknya persepsi *Islamofobia* di dunia barat. *Ketiga*, konsolidasi serta ikhtiar pembangunan infrastruktur dan partisipasi agama untuk keadilan serta rekonsiliasi dunia. *Keempat*, dasar nilai dan pendekatan yang bermakna rekonsiliasi dunia bukan hanya hajat mengkonstruksi kesadaran bersama, karena stabilitas keamanan tidak akan terjadi tanpa ada garansi ketenteraman masyarakat.³⁴ Adapun pendidikan multikultural perspektif Islam bermakna memprioritaskan pendekatan *tawassuth* dalam persepsi kemajemukan. Terdapat tiga pilar sentral dalam konsepsi pendekatan tersebut. (1) pemikiran (*thinking*) (2) gerakan (*movement*) dan (3) perbuatan (*action*). Pemikiran didefinisikan sebagai mindset moderat hendaknya kapabel mengombinasikan aspek teks dan konteks melalui proses dialog. Moderasi dengan motif gerakan bermakna bentuk ikhtiar dalam merepresentasikan kebaikan serta mencegah kemudharatan yang berupa intimidasi dan represi. Pada konteks ini persepsi *truth claim* (menganggap benar sendiri) dilarang dan tidak dianjurkan. Sedangkan moderat dalam konteks perbuatan dimaksudkan dengan suatu perspektif yang resisten dan masif terhadap tradisi dan kultur yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Konsepsi tersebut pada hakikatnya telah diimplentasikan oleh para Wali Songo sebagai penyebar Islam nusantara.

HASIL PENELITIAN

Pendidikan Multikultural dalam konteks pendidikan di Indonesia memiliki harmonisasi dengan sejarah, tradisi dan kultur Nusantara. Argumentasi tersebut memperkuat konsep “ **Bhinneka Tunggal Ika** ” yang termaktub dalam Kitab Sutasoma Karya Mpu Tantular pada era Majapahit. Secara tidak langsung konsep tersebut telah dimanifestasikan secara turun temurun oleh nenek moyang kita yang telah mengajarkan “ *unity in defference* ” (persatuan dalam perbedaan). Pendidikan multikultural memiliki peran sentral dalam

memanifestasikan *mindset* respect, mengakui dan menerima perbedaan. Multicultural Education memberikan ekse konstruktif dalam membentuk perilaku saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

KESIMPULAN

Implementasi pendidikan multikultural predisposisi khazanah nusantara pada konteks madrasah seyogyanya mencakup lima hal utama. *Pertama*, strategi pengembangan perilaku dan karakter. *Kedua*, menghargai *difference* (perbedaan) dan kebhinekaan budaya. *Ketiga*, apresiasi terhadap budaya lain. *Keempat*, konsepsi tersebut memiliki harmonisasi dengan semboyan bangsa Indonesia dengan falsafah Pancasila. *Kelima*, implementasi secara komprehensif konsep moderat (*tawassuth*), tegak (*'itidal*) dan tabayyun.

Pendidikan multikultural memiliki peran sentral dalam memanifestasikan karakter mengakui dan menerima perbedaan (*difference*) dalam keberagaman di madrasah. *Multicultural education* memberikan ekse konstruktif dalam membentuk perilaku saling menghargai, saling menghormati perbedaan serta kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih banyak mengalami kendala terutama dalam Menggunakan *Qualitative approach* dengan jenis penelitian *case study* di harap dalam penelitian selanjutnya lebih dalam menggunakan deep observation.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, 2004, *Ideologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Achmadi, 1992, *Islam sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Aditya Media
- Aditya Media Adler J Mortimoe, 1962, *Philosophy of Education*, Chicago : Univercity of Chicago Press
- Aisyah, 2014, *The Implementation Of Character Education Trough Contextual Teaching and Learning Personality Development Unit In The Sriwijaya University Palembang*, International Journal of Education and Research, Vol. 2 nomor. 10 hlm 203-214
- Al Arifin Akhmad Hidayatullah, 2012, *Implementasi pendidikan Multikultural: Dalam Praksis pendidikan di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 1 No. 1, Juni
- Al Syaebani Omar Muhammad al-Touny, 1979, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung (Jakarta : Bulan Bintang

- Asih Tri, Nashihin Husna, 2019, *Mempertegas Perspektif Pendidikan Multikultural dalam Tardisi Islam Nusantara di Temanggung*, Jurnal Al Ghazali Vo. 2 No. 2, Desember
- Assegaf Abd. Rachman, 2011, *Filsafat pendidikan Islam, Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 16, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003*, Departemen Pendidikan Nasional
- Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 Ayat 1, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003* Departemen Pendidikan Nasional
- Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, dan Pemerintah bagian satu tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 11 ayat 1, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003*, Departemen Pendidikan Nasional
- Bab VIII tentang Kurikulum, Pasal 33 ayat 3, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003*, hlm 25-26
- Baidhawiy Zakiyyudin, 2005, *Pendidikan Agama berwawasan Multikultural*, Jakarta : Erlangga
- Banks James, 1993, *Multicultural Education, Historical Development, Dimention and Practice*, (USA, Review of Research in Education
- Dawam Ainurrafiq, 2003, *Emoh Sekolah “ Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Menuju Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta : Inspial Press
- Dewey John, 1934, *Science of Education*, New York : MCMillan CO
- Dit. PSMA Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2017, *Panduan Implementasi Keterampilan Abad 21 Kurikulum 2013 di SMA*, Kemendikbud
- Freire Paulo, Dzakiri Moh.Hanif, 2000, *Islam dan Pembebasan*, Jakarta: Djambatan,
- Fuad Ismail, 2009, *Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam*, Skripsi Jakarta : Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- Hernandez Hilda, 1989, *Multicultural Education : A Teacher Guide to Linking Context, Proses and Content*, New Jersey & Ohio, Prentice Hall
- Iskandar A. Muhaimin Iskandar, 2010, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, Yogyakarta : LkiS
- M. Ainul Yaqin M. Ainul, 2005, *Pendidikan Multikultural : Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta : Nuansa Aksara
- Ma'arif Syamsul, 2005, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, Yogyakarta, Logung Pustaka
- Mahfud Chairul, 2009, *Pendidikan Multikulturalisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Maksum Ali dkk, (ed), 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan ; Demokrasi, HAM, Social Society dan Multikulturalisme*, Malang : Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat,

- Maslikhah, *Quo Vadis*, 2007 *Pendidikan Multikultural : Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*, Salatiga : STAIN Salatiga Press & JP Books
- Normina, 2017, *Pendidikan dalam Kebudayaan*, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan, 15(28) :
- Qardhawi Yusuf, 2001, *Umat Islam Menyongsong Abad 21*, terjemahan Yogi Prana Izza dan Aksan Takwin Solo : Intermedia
- R. Ambarudin Ibnu, 2016, *Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa yang Nasionalis Religius*, Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan, 13 (1),
- Rosyada Dede, 2009, *Pendidikan Multikultural melalui Pendidikan Agama Islam dalam Imron Mashadi, Reformasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Era Multikultural dalam Zainal Abidin dan Neneng Habidah (ed), Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Pendidikan Multikulturalisme*, (Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta
- Sastrapratedja M. Sastrapratedja, 2009, *Posmodernisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan*, Jurnal Basis : Menembus Fakta, Volume 58 nomor 07-08, Juli-Agustus 2009. Yogyakarta : Kanisius
- Shofa Aris Abd Muid, 2016, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila*, JPK Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1 Nomor 1
- Shofiyulloh MZ, dkk, 2006, *Multikulturalisme, Muhammadiyah dan pluralitas Islam di Yogyakarta*, Jurnal Istiqro' Vol. 05 nomor 01
- Soyomukti Nurani , 2010, *Teori-teori Pendidikan " Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Postmodern "* Jogjakarta : Ar-Ruzz
- Sulalah, 2012, *Pendidikan Multikultural*, Malang, UIN-Maliki Press
- Suparta Mundzier, 2008, *Islamic Multicultural Education : Sebuah Refleksi atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta, Al-Ghazali Center
- Syarkun Mukhlas Syarkun dkk, 2015, *Jembatan Islam-Barat dari Sunan Bonang ke Paman Syam* (Jogjakarta : Penerbit PS
- Takdir Ilahi Muhammad, 2012, *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Tilaar H.A.R Tilaar, 1999, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Tilaar H.A.R Tilaar, 2000, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta : Rieneka Cipta
- Tilaar H.A.R, 2002, *Perubahan Sosial dan Pendidikan : Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta : Grasindo
- Tilaar H.A.R, 2004, *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global masa depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta : Grasindo
- Tobroni, dkk, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Social Society, dan Multikulturalisme*, Malang : PuSAPoM
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional
- Zubaedi, 2004, " *Telaah Konsep Multikulturalisme dan Implementasinya dalam Dunia pendidikan*, *Hermedia* Vo. 3 No. 1 Januari-Ju